

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta. 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Penerbit : Sinar Grafika. Jakarta.
- Ficher dan Ury, 2015, *Tujuan Hukum Negosiasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Garry Goodpaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, ELIPS Project, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Syamsudin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Kencana, Jakarta.
- M. Nasir Asnawi, 2020, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- M. Suyud Margono, 2001, *Hukum Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mexasai Indra, 2015, *Konsepsi Penyelesaian Sengketa Di Indonesia*, Genta Pblishing, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Peranda Media, Jakarta.
- Retno Wulan Sutantio, 1996, *Hukum Acara Perdata*, Gema insani Press, Jakarta.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta.

Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,

Soerjono Soekanto, 2015, *Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (KUHPER)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lihat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Lihat UU No. 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Lihat UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Abritrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lihat PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

**Sumber Lain:**

<https://core.ac.uk/download/pdf/234099036.pdf>, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2021

<https://media.peneliti.com/media/publications/183156-ID-litigasi-dan-non-litigasi-untuk-penyelesaian>. Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2021

<https://media.peneliti.com/media/publications/183156-IG-litigasi-dan-non-litigasi-untuk-penyelesaian>. Diakses Pada Tanggal 25 Januari 2022